

BAB II

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

A. Pengertian Pendidikan Multikultural

Sebagaimana dikutip oleh Chairil Mahfud meminjam pendapat Andersen dan Cusher (1994: 320), bahwa pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Kemudian, James Banks (1993: 3) mendefinisikan Pendidikan Multikultural sebagai pendidikan untuk *People of Color*. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugerah tuhan/*sunnatullah*). Kemudian bagaimana kita mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter.¹

Sejalan dengan pemikiran di atas, Muhaemin el Ma'hady berpendapat bahwa secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan cultural lingkungan masyarakat tertentu bahkan dunia secara keseluruhan (global).²

Pendidikan multikultural merupakan suatu wacana lintas batas. Dalam Pendidikan multikultural terkait masalah-masalah keadilan sosial (Sosial Justice), demokrasi, dan hak asasi manusia. Tidak mengherankan apabila Pendidikan Multikultural berkaitan dengan isu-isu politik, sosial, cultural, moral, edukasional dan agama.³,

Secara umum, multikultural berarti paham keberagaman (majemuk) terhadap kultur (adat) yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Keberagaman di sini meliputi keberagaman suku, agama, ras dan adat istiadat. Di Indonesia, diskursus multicultural dalam aspek pluralisme khususnya Islam dan pluralisme merupakan tema yang banyak menjadi sorotan dari para cendekiawan pada dekade 1980-an, bahkan sampai hari ini. Urgensi

¹ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006) hlm

² *Ibid.* hlm 168

³ H.A.R Tilaar *Kekuasaan dan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hlm 206-207

memperbincangkan diskursus pluralism berangkat dari kondisi obyektif bangsa Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang cukup tinggi, baik secara fisik (negara kepulauan) maupun sosial budaya; bukan saja suku, bahasa, adat istiadat, bahkan agama yang menunjukkan tingkat heterogenitas yang cukup signifikan.⁴

Dalam perspektif yang agak lebih luas, isu multicultural dalam aspek pluralisme perspektif Islam mengandung simplifikasi yang luar biasa, bahkan seringkali mengalami reduksi dan terkesan liberal. Di antaranya adalah: pertama, memang Islam agama wahyu, namun pemahaman orang terhadap Islam bisa bermacam-macam (*multi interpretation*). Kesalahpahaman ini bukan saja di kalangan umat Islam, tapi juga pada pengamat-pengamat asing yang sering memandang Islam dengan wajahnya yang tunggal, termasuk dalam memandang pluralisme. Sifat multi interpretasi terhadap Islam memungkinkan terjadinya diversifikasi terhadap pemahaman keagamaan, baik pada tingkat kognisi maupun aksi. Kedua, di samping agama wahyu, Islam merupakan produk sejarah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ilmu sejarah dapat digunakan untuk melihat tahapan-tahapan perkembangan Islam. Dalam kaitan ini juga orang bisa melihat teks-teks ajaran agama dengan menggunakan kritik historis, fenomenologi dan sebagainya. Ketiga, dialektika Islam dengan dunia luar telah melahirkan sebuah sudut pandang baru terhadap Islam dengan dunia luar telah melahirkan sebuah sudut pandang baru terhadap Islam yang terkadang keluar dari mainstream esensialnya.⁵

Ketiga hal tersebut telah mendorong lahirnya generasi baru Islam yang melihat dan memahami agamanya tidak semata-mata sebagai 'realitas wahyu' tapi juga sebagai realitas sosial. Generasi baru tersebut memahami Islam secara liberal dengan melepaskan diri dari kungkungan masa lalunya. Gerakan pemikiran semacam ini merambah hampir di semua wilayah Islam. Di Indonesia, ide-ide Islam yang demikian telah digandrungi dan bahkan menjadi trend peminat kajian ke-Islaman. Namun demikian, bukan berarti

⁴ Samsul Nizar, *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam : Potret Timur Tengah Era Awal dan Indonesia*, (Ciputat: PT Ciputat Press Group, 2005) hlm 215-216

⁵ *Ibid*, hlm 216

Islam dapat dimaknai secara serampangan dan bisa di warnai oleh multikultural yang diciptakan manusia.⁶

Dalam paragraf di atas menggunakan metode dogmatik yaitu pendekatan yang melihat pendidikan agama sebagai media transmisi ajaran dan keyakinan agama. Tujuannya adalah terwujudnya komitmen dogmatik peserta didik terhadap agamanya. Kelemahan pendekatan ini terletak pada potensinya untuk menumbuhkan fanatisme keagamaan yang tidak pada tempatnya.

Di masa depan, keberlakuan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat akan ditentukan oleh komitmen etik kemanusiaan dalam susunan konstitusi yang tidak lagi terperangkap pada bentuk-bentuk simbolik yang sering disebut sebagai syariah. Dalam kehidupan politik yang semakin terbuka dan demokratis juga sulit diapresiasi prinsip normatif *siyasa* (politik) dalam format klasik. Hal ini merupakan akibat logis dari tumbuhnya pola hidup baru yang bersifat global dan multikultural yang juga menjadi dasar etika sosial.⁷

Masalahnya ialah kesediaan masyarakat Islam untuk melakukan kritik dengan meletakkan seluruh tradisi intelektual dan keberagaman yang selama ini dijadikan referensi utama yang dibakukan sebagai sesuatu yang terbuka. Gejala ideologisasi bagi semua pengalaman intelektual dan keagamaan yang relatif dan parsial perlu dibedakan dari universitas wahyu yang mutlak. Dari sini baru mungkin digagas pengembangan masyarakat Islam berdasar prinsip-prinsip etik yang bisa dan menarik di apresiasi oleh setiap kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang budaya dan keagamaan di dalam sebuah kehidupan dunia yang terbuka, demokrasi dan global.⁸

Al-Qur'an sebagai landasan agama diturunkan untuk semua manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Agar mereka dapat mengarungi kehidupan ini (di dunia) hingga akhirat nanti. Sedangkan, manusia di muka bumi ini

⁶ *Ibid* hlm 217

⁷ Abdul Munir Mulkham, *Strategi Sufistik Semarang*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003) hlm 302

⁸ *Ibid* hlm 303

sangat bermacam-macam bentuknya dan latar belakang yang berbeda-beda. Al-Qur'an bukan hanya untuk orang Islam melainkan untuk seluruh makhluk Allah, untuk meraih kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.

B. Pandangan Islam tentang Pendidikan Multikultural

Sebagaimana yang dikutip oleh Sukron Kamil, yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tetapi di lain pihak mengakui adanya perbedaan di antara kalangan Islam. Menurut Nurcholis, dalam bahasa budaya, demokrasi bukanlah kata benda tetapi lebih merupakan kata kerja, sebagai proses demokratisasi. Demokrasi adalah suatu kategori dinamis. Ia senantiasa bergerak atau berubah, kadang negatif (mundur), kadang positif (berkembang maju).⁹

Dari nilai-nilai pendidikan multikultural tentang penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Islam berprinsip egalitarianisme (persamaan) atau dipertahankannya penghormatan pada hak-hak non muslim dan segi hak-hak perempuan.

Sebagaimana dikutip oleh Idris Thaha meminjam pendapat Amien Rais, kita tidak hanya memerlukan tauhid-akidah, tetapi juga tauhid sosial.¹⁰ Tauhid sosial secara sederhana dapat diartikan dengan penegakan keadaan sosial di dalam masyarakat. Manusia tauhid dan umat tauhid memikul kewajiban untuk menegakkan suatu orde sosial yang adil dan etis. Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk mengutuk ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan, dan menyuruh manusia untuk menegakkan suatu tatanan sosial yang etis dan egalitarian.

Dalam kajian Islam sebagai suatu perangkat ajaran dan nilai, tentunya kita semua setuju, bahwa memang Islam telah meletakkan konsep dan doktrin yang memberikan rahmat bagi *al-alam*. Islam sebagai ajaran yang memuat nilai-nilai normatif, begitu bagusnya dalam memandang dan menempatkan

⁹ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 27.

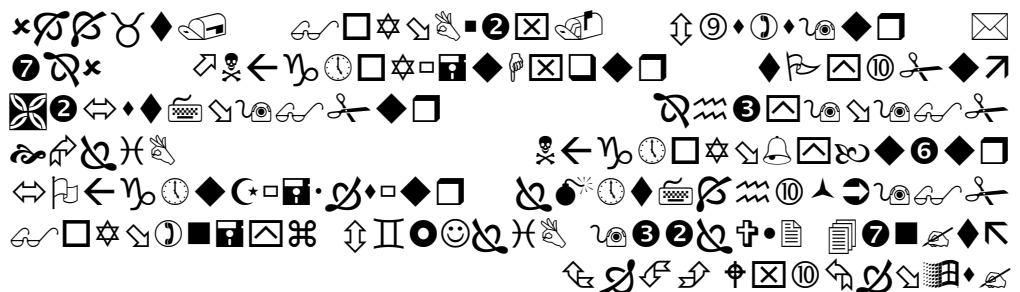
¹⁰ Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 141.

martabat dan harkat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota sosial.¹¹

Pada awal memulai kehidupan di Madinah, langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah menyatukan masyarakat di madinah dan sekitarnya yang terdiri dari beberapa suku dan agama. langkah strategis ini yang melahirkan “Piagam Madinah” yang meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat majemuk. Dalam Piagam Madinah tersebut diatur hubungan antara sesama anggota komunitas Islam, dan antara anggota komunitas Islam dengan komunitas lainnya.

Pendidikan multikultural memegang peranan dan posisi yang strategis dalam rangka mensukseskan pencapaian tujuan yang bernuansa pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu pendidikan multikultural berupaya untuk mensosialisasikan, menanamkan dan menghargai nilai-nilai kemajemukan. Setiap siswa ditanamkan untuk menerima keragaman dalam kehidupan yang harmonis dan saling menolong.¹²

Begitu juga dengan Islam yang mengenal istilah persamaan derajat dan martabat manusia pada umumnya. Sejak semula, salah satu prinsip dalam Islam adalah menjunjung tinggi martabat manusia, dan menempatkannya dalam status supremasi di antara makhluk Tuhan lainnya. Referensi konseptual dalam masalah ini meyakinkan, seperti tertera dalam ayat Al-Qur'an surat al-Isra ayat 70 yaitu:



¹¹ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hlm. 142.

¹² Achmaduddin, *Edukasi Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, Volume 4, Nomor 1*, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama, 2006), hlm. 44.

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”¹³

Dalam melakukan prinsip kemanusiaan, Islam mendeklarasikan sikap dasar kemanusiaan yang sesuai dengan pendidikan multikultural yang bertujuan memanusiation manusia. Dalam Islam persamaan mencakup dalam hukum, proses peradilan, pemberian status sosial dan pengenaan hak harta. Pandangan Islam dalam masalah ini menggunakan paradigma moral dan pendekatan kultural dan humanis.

C. Urgensi Pendidikan Multikultural

Untuk mewujudkan multikulturalisme dalam dunia pendidikan, maka pendidikan multikultural juga perlu dimasukkan kedalam kurikulum nasional, yang pada akhirnya dapat menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang multikultural, serta upaya-upaya lain yang dapat dilakukan guna mewujudkannya.

Karena begitu pentingnya pendidikan multikultural dengan adanya penindasan atau penafikan atas dasar kepemilikan etnis, agama atau bentuk minoritas lainnya. Dikotomi antar kita (kelompok dominan) dan mereka (di luar kelompok dominan) dilembagakan dalam rangka menjauhkan kelompok minoritas dari posisi kekuasaan. Pelembagaan diskriminasi ini terjadi di wilayah-wilayah penting dalam kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, jabatan-jabatan publik dan hubungan-hubungan sosial.

Situasi sosial, kultural masyarakat kita akhir-akhir ini memang semakin mengkhawatirkan. Ada berbagai macam peristiwa dalam pendidikan yang semakin merendahkan harkat dan derajat manusia. Hancurnya nilai-nilai moral, merebaknya ketidakadilan, tipisnya rasa solidaritas dan lain-lain telah

¹³ Imam Jalaluddin Al-Mahalliy, Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1990), hlm. 1154

terjadi dalam lembaga pendidikan kita. Hal ini mewajibkan kita untuk mempertanyakan sejauh mana lembaga pendidikan kita telah menjawab dan tanggap atas berbagai macam persoalan dalam masyarakat kita. Ada apa dengan pendidikan kita sehingga manusia dewasa yang telah lepas dari lembaga pendidikan formal tidak mampu menghidupi gerak dan dinamika masyarakat yang lebih membawa berkah dan kebaikan bagi semua orang.

Pentingnya pendidikan multikultural yaitu:

1. Sebagai Sarana Alternatif Pemecahan Konflik

Meluasnya disintegrasi sosial merupakan salah satu fenomena krusial yang telah membuat negeri ini terbengkalai. Konflik horizontal antar suku, agama, ras, misalnya dan berbagai golongan sampai saat ini masih marak terjadi. Tragedi kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis di akhir tahun 1990-an, misalnya, kemudian konflik kekerasan yang bernuansa politis, etnis dan agama seperti yang terjadi di berbagai wilayah Aceh, Maluku, Kalimantan Barat dan Tengah merupakan salah satu fakta yang tidak terbantahkan bahwa dalam lingkaran sosial bangsa Indonesia masih kokoh semangat narsistik-egosentrisnya.

Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat, khususnya yang kerap terjadi di masyarakat Indonesia yang secara realitas plural. Dengan kata lain, pendidikan multikultural dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial budaya.

Secara sederhana, dalam pandangan multikulturalisme setiap budaya manusia atau kelompok etnik harus diposisikan sejajar dan setara. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih dominan.¹⁴ Spektrum kultur masyarakat Indonesia yang amat beragam menjadi

¹⁴ Lihat dalam berita Media Indonesia, Senin, 29 November 2010

tantangan bagi dunia pendidikan guna mengolah perbedaan tersebut menjadi suatu asset, bukan sumber perpecahan.

Saat ini, Pendidikan Multikultural mempunyai dua tanggungjawab besar, yaitu: menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya.

Dengan demikian, sebagaimana telah diperlihatkan dalam sejarah Indonesia dimasa lampau, kemajemukan itu tidak menimbulkan konflik masyarakat, apalagi kerusuhan sosial. Sebaliknya bahkan menjadi himpunan kekuatan bangsa dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Kemajemukan itu malah telah menjadi slogan persatuan dan kesatuan bangsa; *Bhineka Tunggal Ika*.¹⁵

2. Supaya Siswa Tidak Tercerabut dari Akar Budaya

Dalam era globalisasi saat ini, pertemuan antar-budaya menjadi “ancaman” serius bagi anak didik. Untuk mensikapi realitas global tersebut, siswa hendaknya diberi penyadaran akan pengetahuan yang beragam, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan global, termasuk aspek kebudayaan. Mengingat beragamnya realitas kebudayaan di negeri ini, dan luar negeri, siswa pada era globalisasi ini sudah tentu perlu diberi materi tentang pemahaman banyak budaya atau pendidikan multikultural.¹⁶

Manusia mengembangkan kebudayaan tidak lain sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya menghadapi berbagai tantangan yang datang dari lingkungannya untuk kemudian mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini, tidak serta merta meninggalkan tradisi yang telah ada.¹⁷

¹⁵ Syamsul Ma'arif, *The Beauty of Islam Dalam Cinta dan Pendidikan Pluralisme* (Semarang: NEED'S PRESS, 2008) hlm 83

¹⁶ Chairul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar) hlm 211

¹⁷ Sujarwa, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Manusia dan Fenomena Sosial Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm 198

Jadi, pendidikan multikultural di samping untuk memahami kebudayaan orang lain. Tetapi juga untuk menjaga kebudayaan diri sendiri. Oleh sebab itu, siswa tahu mana budaya yang baik untuk diambil dan mana yang harus ditinggalkan. Serta terbentuknya sifat saling menghargai terhadap kebudayaan masing-masing.

3. Menuju Masyarakat Multikultural

Dalam masyarakat multikultural ditegaskan, bahwa corak masyarakat Indonesia yang *bhinneka Tunggal Ika* ini bukan hanya di maksudkan pada keanekaragaman suku bangsa, melainkan juga keanekaragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Eksistensi keberagaman kebudayaan tersebut selalu dijaga/terjaga yang bisa tampak dalam sikap saling menghargai, menghormati, toleransi antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya.¹⁸ Dalam konteks ini ditegaskan bahwa perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bersatu padu meraih tujuan dan mewujudkan cita – cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁹

Keragaman sosial, baik dalam kelompok budaya maupun pemikiran (perbedaan pendapat) adalah bagian dari “*sunnat Allah*” bahkan dapat dikatakan, bahwa kehidupan ini ada karena dibangun atas keragaman. Oleh karena itu penyelesaiannya ialah membangun pemahaman yang utuh dan mengembangkan sikap arif dalam menyikapi perbedaan. Sehingga perbedaan akan menjadi kekuatan yang sinergis, saling mengisi dan melengkapi dalam membangun peradaban masa depan.²⁰ Hubungan antar manusia ini dapat dibina dan dipelihara, antara lain dengan mengembangkan cara dan gaya hidup yang selaras dengan nilai dan norma yang disepakati bersama dalam masyarakat.²¹

¹⁸ Subagyo, *DKK Pendidikan Kewarganegaraan* (Semarang: UPT MKU UNNES, 2006) hlm 121

¹⁹ *Op Cit*, hlm 227

²⁰ Abdul Wahid, *Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam* (Semarang : NEED’S PRESS, 2008) hlm 172

²¹ Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 270

Dengan pendidikan yang demokratis akan lahir generasi masa depan yang tidak akan kehilangan konteks dan perannya di era keterbukaan dimasa yang akan datang. Perlu dipahami bahwa pendidikan yang demokratis tidak terpaku pola tertentu, dalam pengertian bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat ditanamkan sedini mungkin dalam sistem pendidikan kita, seperti kebebasan berpendapat, membangun tradisi ilmiah yang obyektif dan progresif, kultur dialog dan sebagainya. Maka, pendekatan dalam menyelenggarakan pendidikan dalam abad mendatang sangat diperlukan adanya model pendekatan yang beragam sebagai ganti model pendekatan yang serba seragam yang sudah tidak lagi sesuai dengan semangat demokrasi, keterbukaan, informasi dan kesetaraan.²²

Masyarakat multikultural dalam hal ini adalah proses melaksanakan nilai-nilai civility dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat multikultural adalah proses menuju dan menjaga civil society (masyarakat madani) yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi sebagai way of life-nya. Yang dimaksud dengan civil society di sini, yaitu wilayah-wilayah kehidupan yang bercirikan keterikatan pada norma-norma atau nilai hukum yang diakui, kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat yang demikian itulah sebagai rumah bagi demokrasi.

D. Tujuan Pendidikan Multikultural

Sebagaimana kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia mempunyai filsafat hidup pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pun disusun atas dasar pancasila. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika pendidikan di Indonesia juga berdasarkan pada pancasila, hingga kini, dasar dan tujuan pendidikan nasional secara yuridis masih sama, belum berubah. Tujuan pendidikan Nasional menurut UU 20 tahun 2003 adalah “ untuk

²² Syamsul Ma'arif, *Pesantren Vs Kapitalisme Sekolah* (Semarang : NEED'S PRESS, 2008) hlm 57

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.²³

Sedangkan tujuan Pendidikan Multikultural yaitu:

1. Membangun Paradigma Keberagaman Inklusif

Paradigma keagamaan yang inklusif berarti lebih mementingkan dan menerapkan nilai-nilai agama dari pada hanya melihat dan mengagungkan simbol-simbol keagamaan. Paradigma pemahaman keagamaan aktif sosial berarti agama tidak hanya menjadi alat pemenuhan kebutuhan rohani secara pribadi saja. Akan tetapi yang terpenting adalah membangun kebersamaan dan solidaritas bagi seluruh manusia melalui aksi-aksi sosial yang nyata yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia.²⁴

Dengan membangun paradigma pemahaman keberagaman yang humanis, pluralis dan kontekstual diharapkan nilai-nilai universal yang ada dalam agama seperti kebenaran, keadilan, kemanusiaan, perdamaian dan kesejahteraan umat manusia dapat ditegakkan. Lebih khusus lagi, agar kerukunan dan kedamaian antar beragama dapat terbangun.

2. Menghargai Keragaman Bahasa dan Etnis di Sekolah

Sikap sensitif terhadap masalah-masalah yang diskriminatif khususnya terhadap diskriminasi bahasa yang terjadi di sekolah. Maka niscaya usaha untuk membangun sikap siswa agar mereka dapat selalu menghargai orang lain yang mempunyai bahasa dan dialek yang berbeda, sedikit demi sedikit akan dapat tertanam dan kemudian tumbuh dengan baik.²⁵

²³ Lebih jelas lihat dalam Undang – Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003 (Jakarta: Cemerlang, 2003) hlm 7

²⁴ M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural Cross-cultural Understanding untuk Demokrasi dan keadilan* (Yogyakarta : Pilar Media, 2005) hlm 57

²⁵ *Ibid*, hlm 104

Sekolah sebaiknya berperan aktif dalam membangun pemahaman dan kesadaran siswa tentang pentingnya sikap menghargai dan anti diskriminasi terhadap etnis lainnya dengan cara membuat pusat kajian atau forum dialog untuk mengagagas hubungan yang harmonis antaretnis. Dengan adanya dialog atau kajian ini diharapkan akan terbangun pemahaman dan pandangan siswa yang lebih terbuka terhadap etnis lainnya. Atau bisa juga diadakan pecan atau hari khusus yang mengangkat karakter atau budaya semua etnis yang ada di sekolah tersebut. Dengan adanya kegiatan semacam ini siswa dapat memahami berbagai keunikan dan perbedaan karakteristik serta budaya dari masing – masing etnis.²⁶

3. Membangun Sikap Sensitif Gender

Dalam kehidupan sosial pun pria dan wanita mempunyai hak yang sama. Perannyalah yang berbeda sesuai kodrat yang dimiliki masing-masing.²⁷ Perbedaan jenis kelamin tidak hanya merupakan hal yang berhubungan dengan warisan biologis. Masyarakat menuntut laki-laki dan perempuan untuk bertingkah laku berbeda sesuai dengan perannya masing-masing. Untuk memenuhi harapan ini, anak-anak harus memahami jenis kelamin mereka masing-masing dan mengintegrasikannya ke dalam konsep diri mereka. Dalam Islam, laki-laki juga diajarkan untuk melakukan tugas domestik untuk meringankan beban istri di rumah, jika mereka sedang di rumah.²⁸ Maka, diskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin (*gender*) dan sebagainya tidak memiliki dasar pijakan sama sekali dalam ajaran tauhid.²⁹

Dalam masyarakat Jawa tradisional yang masih kental dengan kultur patriarki, memasak adalah tugas perempuan yang menjadi bagian dari tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Laki-laki, dalam masyarakat Jawa tradisional, dianggap kurang pantas bila berurusan

²⁶ *Ibid* hlm 223

²⁷ Baharudin Lopa, *Al Qur'an dan hak-hak asasi manusia* (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1999) hlm 66

²⁸ Aliah B, Purwakanian Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006) hlm 242

²⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: Lkis, 2009) hlm 11

dengan dunia masak memasak. Di sisi lain, dalam masyarakat Jawa yang lebih berpikir terbuka, urusan masak memasak tidak ada kaitannya dengan adanya anggapan pantas dan tidak pantas bagi laki-laki atau perempuan. Urusan masak memasak, dalam kelompok masyarakat ini, sangat berkaitan erat dengan adanya “kesempatan” bagi keduanya. Karena kesibukan masing-masing pihak, baik perempuan atau laki-laki, apabila yang mempunyai kesempatan memasak adalah pihak laki-laki maka yang bertugas memasak adalah laki-laki, begitu pula sebaliknya.